
RENCANA KERJA (RENJA)

**TAHUN
2025**



KECAMATAN JAWAI

KATA PENGATAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025. Rencana Kerja ini suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025. Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025 ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang baik oleh Perangkat Daerah Kecamatan Jawai.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan selama 1 (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026, dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2021–2026.

Materi utama dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025 ini adalah berisi deskripsi bagaimana capaian kinerja yang hendak diwujudkan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Jawai pada tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Melalui instrumen ini diharapkan dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam membangun pemerintahan yang baik dan terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

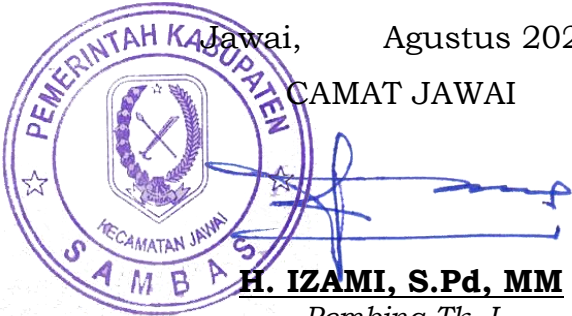
Mengamati pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 disamping mengoptimalkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah berjalan

juga dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 terdiri dari pendahuluan, evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian rencana strategis Perangkat Daerah Kecamatan Jawai, dan dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, dan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami mengharapkan dokumen rencana kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai pada tahun 2025.

Jawai, Agustus 2024
CAMAT JAWAI

H. IZAMI, S.Pd, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700506 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT	
DAERAH TAHUN LALU.....	18
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	18
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	28
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	40
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V. PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renja perangkat daerah diawali dengan melakukan persiapan penyusunan Renja, meliputi penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja perangkat daerah, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya dilakukan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Jawai Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Jawai 2021-2026, dan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Renja Kecamatan Jawai Tahun 2025. Proses penyusunan Renja Kecamatan Jawai terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah

merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu untuk menjembatani perencanaan tingkat perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja disusun oleh masing-masing perangkat daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang akan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten serta sebagai dasar pengusulan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi maupun APBN.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025 merupakan bagian dari RKPD Kabupaten Sambas dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai. Renja Perangkat Daerah disusun untuk memberikan informasi data bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi perangkat daerah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi

kinerja perangkat daerah. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekat pada ke tataran *clean government* dan *good governance*. Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program kegiatan, dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 66);

17. Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sambas Nomor 55);
18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 105).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Jawai dimaksudkan sebagai berikut:

1. sebagai bentuk penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sambas dan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan kepala daerah untuk mencapai program/kegiatan/sub kegiatan, kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas;
2. menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kecamatan Jawai dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya. Dan juga untuk menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, bersih, bertanggung jawab bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berdaya

guna dan berhasil guna untuk tujuan keberhasilan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

3. untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.
4. menjadi panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025.

Adapun tujuan dari Renja ini adalah sebagai berikut:

1. untuk merencanakan program pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran-sasaran strategis selama tahun 2025 yang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2025 dalam mencapai tujuan dengan implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
2. sebagai dokumen perencanaan untuk mengakomodasi semua sasaran yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai tahun 2025;

3. menjadi acuan bagi Perangkat Daerah Kecamatan Jawai dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025;
4. memberikan informasi deskripsi kondisi riil Kecamatan Jawai beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Kecamatan Jawai;
5. menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Jawai dalam menilai implementasi program, kegiatan serta sub kegiatan operasional Tahun 2025;
6. merumuskan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Jawai Tahun 2025;
7. untuk memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025; dan
8. memberikan pedoman dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tahun 2025 sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai disusun menurut sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai dengan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jawai.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan bupati/daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah Kecamatan Jawai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JAWAI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jawai.

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jawai berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jawai mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah Kecamatan Jawai yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jawai; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang disajikan adalah Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jawai s/d Tahun Berjalan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Jawai, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31:

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Misal:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - Pencapaian SDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian NSPK dan SPM,
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan daerah terisolir,
 - Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JAWAI

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah .

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Jawai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Jawai selama tahun sebelumnya dan perkiraan target tahun 2025.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Jawai dan pencapaian Renstra Kecamatan Jawai s/d tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 dibawah ini.

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas
Periode Pelaksanaan: Triwulan IV (Empat) Tahun 2024

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menaungi pada sasaran RKPD:
Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jawai

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				5			6		7		8		9			10		11			12		13 = 8 + 12		
				K	Rn		K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn		K	Rn	K	Rn		K	Rn	K	Rn	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		UNSUR KEWILAYAHAN	100%	11.457.476.414	99,12%	2.123.361.845	100%	2.206.429.340	12,01%	389.375.882	21,16%	415.349.829	20,22%	422.033.033	38,21%	741.488.900	91,47%	2.188.447.444	91,67%	4.311.809.489	91,67%	34,92%	Kecamatan Jawai		
		KECAMATAN	100%	11.457.476.414	99,17%	2.123.361.845	100%	2.206.429.340	12,01%	389.375.882	21,16%	415.349.829	20,22%	422.033.033	38,21%	741.488.900	91,67%	2.188.447.444	91,67%	4.311.809.489	91,67%	34,99%	Kecamatan Jawai		
1.	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	10.321.426.351	95,01%	1.811.272.645	100%	1.914.205.013	9,91%	345.342.782	34,63%	553.554.779	13,63%	344.155.183	41,83%	653.716.900	100,00%	1.896.769.644	28,35%	3.708.042.289	37,82%	35,93%	Kecamatan Jawai		
1.1	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	68.754.900	100,00%	15.822.000	100%	16.449.428	8,00%	3.932.400	4,00%	2.223.300	40,00%	3.360.150	48,00%	6.871.550	100,00%	16.387.400	40,00%	32.209.400	40,00%	46,85%	Sekretariat		
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	21.760.786	2 Dokumen	3.954.300	2 Dokumen	3.099.584	-	-	-	1 dokumen	1.449.850	1 dokumen	1.589.250	2 dokumen	3.039.100	4 Dokumen	6.993.400	36,36%	32,14%	Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan			
1.1.2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	12.789.555	1 Dokumen	2.437.350	2 Dokumen	3.539.474	1 dokumen	2.139.400	-	0	-	0	1 dokumen	1.399.700	2 dokumen	3.539.100	3 Dokumen	5.976.450	60,00%	46,73%	Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan		
1.1.4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5 Dokumen	6.930.308	1 Dokumen	1.320.000	2 Dokumen	3.902.474	1 dokumen	1.493.000	-	608.000	-	0	1 dokumen	1.801.100	2 dokumen	3.902.100	3 Dokumen	5.222.100	60,00%	75,35%	Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan		
1.1.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi inerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	7.756.402	1 Laporan	1.453.150	1 Laporan	2.215.470	-	300.000	1 dokumen	1.615.300	-	0	-	300.000	1 dokumen	2.215.300	2 laporan	3.668.450	40,00%	47,30%	Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan		
1.1.7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 Laporan	19.517.849	18 Laporan	3.697.500	18 Laporan	3.692.426	-	-	-	-	9 laporan	1.910.300	9 laporan	1.781.500	18 laporan	3.691.800	36 laporan	7.389.300	40,00%	37,86%	Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan		
1.2	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.465.335.516	100,00%	1.436.535.376	100%	1.500.845.179	8,82%	284.258.350	35,29%	444.571.749	17,65%	265.237.656	38,24%	494.696.650	100,00%	1.488.764.405	40,00%	2.925.299.781	40,00%	34,56%	Sekretariat		
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/ 70 Bulan	8.290.154.399	17 Orang/ 14 Bulan	1.401.773.676	15 Orang/ 14 Bulan	1.465.436.040	15 Orang/ 3 Bulan	279.378.350	15 Orang/ 5 Bulan	436.056.149	15 Orang/ 3 Bulan	257.062.656	15 Orang/ 3 Bulan	480.980.250	15 Orang/ 14 Bulan	1.453.477.405	15 Orang/ 28 Bulan	2.855.251.081	35,71%	34,44%	Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan		
1.2.2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	146.400.000	1 Dokumen	29.280.000	1 Dokumen	29.280.000	-	4.880.000	-	7.320.000	-	7.320.000	1 dokumen	9.740.000	1 dokumen	29.280.000	2 Dokumen	58.560.000	40,00%	40,00%	Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan		
1.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	7.367.334	1 Laporan	1.403.200	1 Laporan	2.022.007	-	-	-	-	-	1 laporan	2.021.800	1 Laporan	2.021.800	2 Laporan	3.425.000	40,00%	46,49%	Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan			
1.2.4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	90 Laporan	21.413.783	18 Laporan	4.078.500	18 Laporan	4.107.132	-	-	7 laporan	1.195.600	3 laporan	855.000	8 laporan	1.934.600	18 laporan	3.985.200	28 laporan	8.063.700	40,00%	37,66%	Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan		
1.3	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	234.500.000	100,00%	17.082.900	100%	10.462.000	0,00%	-	100,00%	9.740.500	-	-	-	100,00%	9.740.500	30,00%	26.823.400	30,00%	11,44%	Sekretariat			
1.3.2	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49 Orang	234.500.000	-	-	1 Orang	10.462.000	-	-	-	1 orang	9.740.500	-	-	-	1 orang	9.740.500	1 orang	9.740.500	2,04%	4,15%	Subbagian Umum dan Kepegawaian		
1.4	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	516.282.961	98,40%	105.165.600	100%	176.591.378	32,56%	28.749.300	25,58%	50.947.700	12,79%	31.984.250	29,07%	62.045.255	100,00%	173.726.505	40,00%	278.892.105	40,00%	54,02%	Sekretariat		
1.4.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25 Paket	19.442.998	5 Paket	5.564.400	5 Paket	21.023.620	1 Paket	3.958.500	2 paket	7.540.500	1 Paket	5.917.400	1 paket	3.595.900	5 paket	21.012.300	10 paket	26.576.700	40,00%	136,69%	Subbagian Umum dan Kepegawaian		
1.4.2	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	125 Paket	42.664.650	23 Paket	8.162.500	25 Paket	10.077.544	8 paket	3.698.000	4 paket	1.896.500	4 paket	1.994.150	9 paket	2.483.350	25 paket	10.072.000	48 paket	18.234.500	38,40%	42,74%	Subbagian Umum dan Kepegawaian		
1.4.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	235 Paket	78.502.965	48 Paket	16.753.400	47 Paket	21.532.682	18 Paket	6.640.900	12 paket	5.487.800	5 paket	2.778.100	12 paket	6.617.500	47 paket	21.524.300	95 paket	38.277.700	40,43%	48,76%	Subbagian Umum dan Kepegawaian		
1.4.4	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40 Paket	64.323.084	8 Paket	12.445.300	8 Paket	27.381.532	1 paket	5.551.900	4 paket	11.143.700	1 paket	3.914.000	2 paket	6.770.800	8 paket	27.380.400	16 paket	39.825.700	40,00%	61,92%	Subbagian Umum dan Kepegawaian		
1.4.5	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	311.349.264	1 Laporan	62.240.000	1 Laporan	96.576.000	-	8.900.000	-	24.879.200	-	17.380.600	1 laporan	42.577.705	1 Laporan	93.737.505	2 laporan	155.977.505	40,00%	50,10%	Subbagian Umum dan Kepegawaian		

1.5	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	288,538,261	100.00%	57,449,000	100%	61,800,000	0.00%	-	50.00%	14,319,000			50%	45,880,000	100.00%	60,199,000	40.00%	117,648,000	34.72%	40.77%	Sekretariat
1.5.1	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	184,818,200	2 unit	42,020,000	2 Unit	47,000,000	-	-					2 unit	45,880,000	2 unit	45,880,000	4 unit	87,900,000	50.00%	47.56%	Subbagian Umum dan Kepegawaian
1.5.2	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	48 Unit	44,000,000	2 Unit	5,883,000	-	-	-	-						-	-	-	2 unit	5,883,000	4.17%	13.37%	Subbagian Umum dan Kepegawaian
1.5.4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	59,720,061	1 Unit	9,546,000	2 Unit	14,800,000	-	-	2 unit	14,319,000					2 unit	14,319,000	3 unit	23,865,000	50.00%	39.96%	Subbagian Umum dan Kepegawaian
1.6	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	350,734,400	100.00%	69,782,269	100%	78,597,028	0.00%	14,797,732	0.00%	18,872,530		18,765,327	100%	26,131,545	100.00%	78,567,134	40.00%	148,349,403	40.00%	42.30%	Sekretariat
1.6.1	Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	6,000,000	1 Laporan	1,200,000	1 Laporan	1,320,000	-	600,000			300,000	1 laporan	420,000	1 Laporan	1,320,000	2 Laporan	2,520,000	40.00%	42.00%	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
1.6.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Laporan	145,094,400	1 Laporan	28,854,269	1 Laporan	36,245,908	-	5,377,732		8,656,230		9,068,287	1 laporan	13,113,765	1 Laporan	36,216,014	2 Laporan	65,070,283	40.00%	44.85%	Subbagian Umum dan Kepegawaian
1.6.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Laporan	199,640,000	1 Laporan	39,728,000	1 Laporan	41,031,120	-	8,820,000		10,216,300		9,397,040	1 laporan	12,597,780	1 Laporan	41,031,120	2 Laporan	80,759,120	40.00%	40.45%	Subbagian Umum dan Kepegawaian
1.7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	397,280,313	116.67%	79,410,300	100%	69,460,000	20.00%	13,605,000	27.50%	12,880,000	25.00%	24,807,800	28%	18,091,900	100.00%	69,384,700	40.00%	148,795,000	40.00%	37.45%	Sekretariat
1.7.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64 Unit	269,980,313	8 Unit	35,820,700	12 Unit	21,310,000	3 unit	6,380,000	3 unit	5,200,000	2 unit	2,978,500	4 unit	6,676,900	12 unit	21,235,400	20 unit	57,056,100	46.88%	21.13%	Subbagian Umum dan Kepegawaian
1.7.2	Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 Unit	36,500,000	15 Unit	10,950,000	27 Unit	18,910,000	5 Unit	3,475,000	8 unit	5,690,000	8 unit	5,600,000	6 unit	4,145,000	27 unit	18,910,000	42 unit	29,860,000	84.00%	81.81%	Subbagian Umum dan Kepegawaian
1.7.3	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	90,800,000	1 Unit	32,639,600	1 Unit	29,240,000	-	3,750,000		1,990,000		16,229,300	1 unit	7,270,000	1 unit	29,239,300	2 unit	61,878,900	40.00%	68.15%	Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	261,929,648	100.00%	80,892,800	100%	51,588,294	0.00%	5,763,800	0.00%	14,695,750		11,210,000	100%	19,898,400	100.00%	51,567,950	100.00%	132,460,750	100.00%	50.57%	Kecamatan Jawai
2.1	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	20,182,748	100.00%	12,678,000	100%	7,012,306	-		-	3,784,200			100%	3,227,400	100.00%	7,011,600	40.00%	19,689,600	40.00%	97.56%	Kecamatan Jawai
2.1.1	Tertaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	20,182,748	1 Laporan	3,728,200	1 Laporan	7,012,306	-	-		3,784,200			1 laporan	3,227,400	1 Laporan	7,011,600	2 laporan	10,739,800	40.00%	53.21%	Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi
2.2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	54,783,599	100.00%	13,420,500	100%	9,230,649	0.00%	1,320,000		3,175,200		2,040,000	100%	2,695,000	100.00%	9,230,200	40.00%	22,650,700	40.00%	41.35%	Kecamatan Jawai
2.2.2	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	54,783,599	1 Laporan	10,142,000	1 Laporan	9,230,649	-	1,320,000		3,175,200		2,040,000	1 laporan	2,695,000	1 Laporan	9,230,200	2 Laporan	19,372,200	40.00%	35.36%	Seksi Tata Pemerintahan
2.3	Tertaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	186,963,301	100.00%	54,794,300	100%	35,345,339	0.00%	4,443,800		7,736,350		9,170,000	100%	13,976,000	0.00%	21,350,150	40.00%	76,144,450	40.00%	40.73%	Kecamatan Jawai
2.3.2	Tertaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	186,963,301	1 Laporan	40,224,500	1 Laporan	Rp35.345.339	-	4,443,800		7,736,350		9,170,000	1 laporan	13,976,000	1 Laporan	35,326,150	2 Laporan	75,550,650	40.00%	40.41%	Seksi Tata Pemerintahan
3.	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	638,776,882	100.00%	109,419,450	100%	94,256,738	90.91%	27,925,700	4.55%	26,046,900	2.27%	17,147,500	2.27%	23,083,800	100.00%	94,203,900	100.00%	203,623,350	100.00%	31.88%	Kecamatan Jawai
3.1	Tertaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	615,016,260	100.00%	105,029,000	100%	87,106,912	90.91%	27,925,700	4.55%	21,883,600	2.27%	15,690,100	2.27%	21,555,100	100.00%	87,054,500	39.68%	192,083,500	24.44%	31.23%	Kecamatan Jawai
3.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	195 Lembaga Masyarakat at an	58,572,875	39 Lembaga	10,637,450	39 Lembaga Kemasyarak at an	15,171,900	39 Lembaga Kemasyara katan	15,170,700						39 Lembaga Kemasyarak at an	15,170,700	39 Lembaga Kemasyarak at an	25,808,150	20.00%	44.06%	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.1.2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45 Laporan	556,443,385	8 Laporan	94,391,550	5 Laporan	71,935,012	1 Laporan	12,755,000	2 laporan	21,883,600	1 Laporan	15,690,100	1 laporan	21,555,100	5 laporan	71,883,800	13 laporan	166,275,350	28.89%	29.88%	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Terselenggaranya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat		100%		100.00%	4,390,450	100%		0.00%							0.00%	-	0.00%	4,390,450	0.00%	0.00%	Kecamatan Jawai	
3.2	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	23,760,622	100.00%	4,390,450	100%	7,149,826	0.00%	-		4,163,300	1,457,400	100%	1,528,700	100.00%	7,149,400	40.00%	11,539,850	40.00%	48.57%	Kecamatan Jawai	
3.2.1	Terselenggaranya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	23,760,622	1 Laporan	4,390,450	1 Laporan	7,149,826	-	-		4,163,300	1,457,400	1 laporan	1,528,700	1 Laporan	7,149,400	2 Laporan	11,539,850	40.00%	48.57%	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4.	Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	70,070,109	100.00%	15,033,900	100%	30,639,334	0.00%	2,115,600	25.00%	8,280,500	50.00%	7,183,000	25.00%	13,056,400	100.00%	30,635,500	100.00%	45,669,400	30.00%	65.18%	Kecamatan Jawai
4.1	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	20,710,972	50.00%	6,622,000	100%	4,010,026	0.00%	-		-	100.00%	4,009,600			100.00%	4,009,600	40.00%	10,631,600	40.00%	51.33%	Kecamatan Jawai
4.1.2	Terselenggaranya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	20,710,972	1 Laporan	3,740,800	1 Laporan	4,010,026	-	-		1 Laporan	4,009,600			1 Laporan	4,009,600	2 Laporan	7,750,400	40.00%	37.42%	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
4.2	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	49,359,137	0.00%	8,411,900	100%	26,629,308	0.00%	2,115,600	50.00%	8,280,500		3,173,400	50.00%	13,056,400	100.00%	26,625,900	40.00%	35,037,800	20.00%	70.99%	Kecamatan Jawai
4.2.1	Terselenggaranya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15 Laporan	49,359,137	1 Laporan	8,411,900	2 Laporan	26,629,308	-	2,115,600	1 laporan	8,280,500		3,173,400	1 laporan	13,056,400	2 laporan	26,625,900	3 laporan	35,037,800	20.00%	70.99%	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.	Terselenggaranya Usuran Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum	100%	110,829,704	100.00%	32,232,950	100%	53,512,543	0.00%	-	48.39%	3,844,600	40.32%	35,799,150	11.29%	13,830,100	100.00%	53,473,850	37.74%	85,706,800	39.38%	77.33%	Kecamatan Jawai
5.1	Terselenggaranya Usuran Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	110,829,704	100.00%	32,232,950	100%	53,512,543	0.00%	-	48.39%	3,844,600	40.32%	35,799,150	11%	13,830,100	100.00%	53,473,850	40.00%	85,706,800	39.38%	77.33%	Kecamatan Jawai
5.1.1	Terselenggaranya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	50,906,788	35 Orang	21,186,800	40 Orang	41,796,271	-	-		30 orang	34,559,150	10 orang	7,199,700	40 orang	41,758,850	75 orang	62,945,650	37.50%	123.65%	Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	
5.1.2	Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	400 Orang	32,687,262	80 Orang	6,039,100	80 Orang	5,085,026		60 orang	3,844,600	20 orang	1,240,000		80 orang	5,084,600	160 orang	11,123,700	40.00%	34.03%	Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi		
5.1.3	Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Demokrasi berdasarkan Pancasila	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	15 Lembaga Masyarakat	14,211,023	3 Lembaga	2,594,550	3 Lembaga Masyarakat	3,834,628	-	-			3 Lembaga Masyarakat	3,834,200	3 Lembaga Masyarakat	3,834,200	6 Lembaga	6,428,750	40.00%	45.24%	Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi		
5.1.4	Terselenggaranya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	13,024,631	1 Dokumen	2,412,500	1 Dokumen	2,796,618	-	-			1 dokumen	2,796,200	1 dokumen	2,796,200	2 dokumen	5,208,700	40.00%	39.99%	Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi		
6.	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	254,443,722	100.00%	74,510,100	100%	62,227,418	16.67%	8,228,000	16.67%	8,927,300	16.67%	6,538,200	50.00%	38,103,300	100.00%	61,796,800	100.00%	136,306,900	100.00%	53.57%	Kecamatan Jawai
6.1	Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	254,443,722	100.00%	74,510,100	100%	62,227,418	16.67%	8,228,000	16.67%	8,927,300	16.67%	6,538,200	50%	38,103,300	50.00%	61,796,800	40.00%	136,306,900	40.00%	53.57%	Kecamatan Jawai
6.1.2	Terselenggaranya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	13,439,060	1 Dokumen	3,274,300	1 Dokumen	6,628,536	1 dokumen	6,628,000					1 dokumen	6,628,000	2 dokumen	9,902,300	40.00%	73.68%	Seksi Tata Pemerintahan		
6.1.3	Terselenggaranya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	150,179,507	2 Dokumen	31,773,700	2 Dokumen	27,457,892	-	1,600,000		3,730,200	520,000	2 dokumen	21,603,800	2 dokumen	27,454,000	4 dokumen	59,227,700	40.00%	39.44%	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kecamatan Jawai merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Jawai dan merupakan perangkat daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat di Kecamatan Jawai. Artinya bahwa tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah peningkatan pelayanan kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Jawai, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi surat menyurat, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas. Dengan demikian, Perangkat Daerah Kecamatan Jawai menangani pelayanan masyarakat di Kecamatan Jawai mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum. Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016–2021.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan/sub kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/ kegiatan/sub kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang

diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi SKPD.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai dapat dilihat sebagaimana Tabel T.C.30 sebagai berikut:

TABEL T-C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JAWAI
KABUPATEN SAMBAS

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jawai			83,50 (B)	86,50 (B)	89,25 (A)	90,75 (A)	92,25 (A)	83,50 (B)	86,50 (B)	89,25 (A)	90,75 (A)	92,25 (A)	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2024 yaitu pada kondisi kinerja pada tahun pertama periode RPJMD dimana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Jawai untuk pelayanan publik adalah 86,55 dengan mutu pelayanan “Baik” bahwa indikator nilai tertinggi adalah indikator “kompetensi petugas”, sedangkan indikator nilai terendah “sarana dan prasarana”. Adapun indikator unsur-unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3.100
U2	Prosedur Pelayanan	3.167
U3	Kecepatan Pelayanan	3.367
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3.600
U5	Kesesuaian Pelayanan	3.200
U6	Kompetensi Petugas	3.633

U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3.467
U8	Penanganan Pengaduan	3.067
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.500

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai dalam hal kritis adalah:

1. meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
2. mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan penggunaan atribut pendukung petugas pelayanan; dan
3. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan dan sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu proses pelayanan publik.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Jawai sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengamanatkan bahwa dari sisi *budgeting* alokasi anggaran kecamatan berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dimasukkan dalam anggaran kecamatan. Dalam upaya untuk mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sambas terkait dengan kedudukan Kecamatan Jawai, maka dibutuhkan komitmen dan dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Kecamatan Jawai, sehingga pembangunan di wilayah Kecamatan Jawai tetap berjalan dengan pesat dan tidak ketinggalan dengan Kecamatan yang lainnya.
2. Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang

menjadi visi dan misi kepala daerah bisa terwujud. Kemudian faktor yang mempengaruhi secara intern antara lain yaitu motivasi kerja dan kapasitas SDM pegawai Kecamatan Jawai. Dalam upaya untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja maka diperlukan adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. Sementara dari sisi ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan secara optimal.

3. Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang terbatas namun tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat, sehingga dengan kondisi tersebut aparatur Kecamatan Jawai harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup kondisi gedung perkantoran yang perlu untuk direhabilitasi sehingga mencapai standar kelayakan untuk pelayanan, serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat.
4. Kondisi sosiologis masyarakat Kecamatan Jawai yang bernuansa perdesaan dengan berbagai kompleksitas dan dinamika yang ada tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang berjalan selama ini tentu belum mampu menyentuh semua kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi ini maka diharapkan adanya dukungan kebijakan anggaran yang memadai untuk menampung kebutuhan masyarakat. Untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang belum tertampung dalam struktur anggaran Kecamatan, diharapkan dapat tercover oleh organisasi perangkat daerah terkait untuk diimplementasikan di wilayah Kecamatan Jawai.

Dari beberapa aspek kajian permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah Kecamatan Jawai sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa tantangan yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang. Beberapa tantangan dan peluang yang ada antara lain:

1. Tantangan :

1.1 Tantangan eksternal

- 1) penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berupa efektifitas kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat;
- 2) penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat;
- 3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dan penerapan serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 4) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dan pembinaan kerukunan umat beragama;
- 5) pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam rangka tata kelola administrasi dan keuangan serta aset desa, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, pendampingan desa, dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;

1.2 Tantangan internal

- 1) penyusunan struktur organisasi saat ini sedang dalam penyesuaian-penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini mengakibatkan sulitnya penempatan aparatur Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas sesuai kebutuhan dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat sehingga pentingnya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi;
- 2) sumber daya manusia masih kurang profesional, baik menyangkut keterampilan, keahlian, dan tingkat pengetahuan;
- 3) sumber daya prasarana dan sarana yang masih kurang memadai sehingga belum maksimal menunjang pelaksanaan tugas dan kurangnya peralatan kerja secara kuantitatif maupun kualitatif dan teknologi yang tertinggal; dan
- 4) dana yang berasal dari APBD (DAU) masih belum mencukupi untuk membiayai berbagai kegiatan pelayanan umum.

2. Peluang :

2.1 Peluang eksternal

- 1) meningkatnya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan untuk mewujudkan sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dan efektifitas inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat, dan terbinanya program keluarga harapan.

- 2) meningkatnya pelayanan publik yang diwujudkan dengan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan efektifitas pelayanan dengan melakukan evaluasi pelayanan secara berkelanjutan, dan tata kelola pelayanan rekomendasi dan administrasi kependudukan;
- 3) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang di kecamatan;
- 4) meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan menyelenggarakan fasilitasi penanganan stunting, koordinasi pembinaan anak usia dini, pembinaan PHBS dan sanitasi lingkungan, pembinaan pokjanal posyandu, pembinaan usaha kesehatan sekolah, pembinaan PKK desa, dan pelaksanaan lomba desa;
- 5) meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- 6) meningkatnya upaya ketenteraman dan ketertiban umum dengan upaya sinergitas dengan POLRI, TNI, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat dalam menumbuhkan sikap saling menghormati, memahami, dan toleransi antar sesama manusia di dalam lingkungan masyarakat, dan sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau POLRI;
- 7) meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dengan upaya mensukseskan pelaksanaan upacara peringatan HUT Republik Indonesia, pembinaan kerukunan kehidupan beragama, dan pengembangan kehidupan demokrasi dalam masyarakat;

- 8) meningkatnya tertib administrasi dalam penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, tugas dan fungsi kepala desa dan perangkat desa, dan sinergi RKP desa dengan status kemajuan desa dalam mewujudkan desa mandiri.
- 9) meningkatnya pendampingan desa dan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan.

2. Peluang internal

- (1) tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja;
- (2) terwujudnya tata kelola administrasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum perangkat daerah;
- (3) tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan publik; dan
- (4) tersedianya jasa penunjang penunjang urusan pemerintahan daerah.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

1. perlu adanya upaya pengelolaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota secara efektif dan efisien;
2. dalam usaha mendukung pengentasan kemiskinan, maka dibutuhkan pendampingan kepada keluarga miskin secara lebih intensif, terutama dengan mengoptimalkan keberadaan kader kemiskinan;
3. perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam perencanaan pelayanan publik dan pembangunan serta penyusunan rencana strategis sehingga diperoleh output yang lebih aspiratif;

4. perlu adanya upaya meningkatkan kemampuan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
5. perlunya sinergitas dengan POLRI, TNI, instansi vertikal, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat untuk mewujudkan rasa aman masyarakat;
6. perlu adanya upaya penanaman wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta peningkatan kerukunan di masyarakat terutama kepada generasi muda; dan
7. perlu adanya upaya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa secara berkelanjutan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Jawai berdasarkan RKPD Kabupaten Sambas sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD seKabupaten Sambas yang melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Jawai.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Rancangan awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan perangkat daerah dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dengan prosedur *bottom-up*. Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat umum.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Kecamatan Jawai dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Sambas “Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan” adalah letak geografis Kecamatan Jawai yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Sambas termasuk wilayah pengembangan lingkaran luar Kabupaten Sambas sehingga pertumbuhan Kabupaten Sambas mengarah ke Kecamatan Jawai baik dari sisi ekonomi, pertanian/perkebunan, perikanan, jasa dan pariwisata.

Kecamatan Jawai merupakan salah satu perangkat daerah yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah Kabupaten Sambas. Pembangunan Kabupaten Sambas dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di Kecamatan Jawai juga mengalami perubahan yang nyata. Akselerasi transformasi sosial, ekonomi, dan politik di Kecamatan Jawai akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Sambas.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Jawai untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kerukunan dan kehidupan

demokrasi berdasarkan Pancasila di masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial, ekonomi, dan politik di Kecamatan Jawai membutuhkan sinergitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, semua organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Kecamatan Jawai sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Sambas untuk melihat Kecamatan Jawai secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat dilihat Tabel T-C.31.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan RENSTRA, sedangkan Renja Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sambas Tahun 2025.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Jawai Tahun 2025 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan. Kedudukan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dengan Visi adalah “Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”. Memperhatikan Visi Kabupaten Sambas tersebut diatas, proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta

proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (*acceptancy*) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas selaku Perangkat Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Jawai adalah transformasi pelayanan publik. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pencapaian sasaran pokok ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi transformasi pelayanan publik, melalui penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan publik dengan peningkatan indeks kepuasan masyarakat.

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada

re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan beorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi.

Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Jawai yang akan mengisi suatu organisasi dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/ keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditetakkan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk menguasai IPTEK.

Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Jawai adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kedepan, Kecamatan Jawai diharapkan dapat secara fokus dalam proses perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai, isu-isu penting yang dihadapi dapat ditinjau dari 5 (lima) arah kebijakan yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Dalam urusan kewilayahan di kecamatan terdapat permasalahan pokok yaitu terkait isu kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Identifikasi rumusan isu-isu penting pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai didasarkan pada hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir terdapat rumusan permasalahan pokok dalam upaya “Bagaimanakah Perangkat Daerah Kecamatan Jawai meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Jawai?” Apabila salah dalam menentukan apa yang akan diproduksi untuk memenuhi keinginan yang dilayani, bisa berakibat pada ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah bukan semakin baik seperti yang diharapkan, namun mengalami pasang surut.

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah tersebut. Namun dalam realitanya masalah pelayanan publik di lingkungan pemerintahan sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik

yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan yang berbelit-belit, in-efisiensi, lambat, tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bukti nyata bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah masih rendah dan pelayanan publik belum berkualitas. Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan publik kecamatan dalam meningkatnya pembinaan dan pengawasan, pemerintahan Umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, dan pelayanan umum dapat diidentifikasi beberapa isu-isu penting yang dijumpai antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 - a. Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
 - b. Birokrasi yang belum efektif dan efisien.
 - c. Perencanaan kegiatan pelayanan belum terorganisasi dengan baik.
 - d. Hampir semua pelayanan publik belum memenuhi standar.
2. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
 - a. Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk.

- b. Pada berbagai kasus sering terjadi bahwa upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak berhasil mengembangkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat disebabkan belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
 - c. Pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan yang merupakan masalah pokok nasional dan penanggulangannya tidak dapat ditunda lagi dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.
 - d. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan.
 - e. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
3. Ketenteraman dan ketertiban umum
- a. Masih kurang dan belum optimalnya penanganan kasus pelanggaran dan kasus-kasus lainnya yang meresahkan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
 - b. Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau peraturan perundang-undangan.
 - c. Masih tingginya kenakalan remaja di wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh menurunnya penerapan budaya lokal.
 - d. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
 - e. Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- Tantangan yang paling berpotensi menjadi ancaman terhadap kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa sekarang ini justru ini lebih banyak muncul dari dalam negeri sendiri. Seperti

penyebaran isu-isu yang bersifat sara oleh kelompok-kelompok tertentu yang telah meresahkan ketenteraman masyarakat. Isu-isu itu disebarluaskan melalui pernyataan-pernyataan sikap atau ungkapan-ungkapan yang dapat menimbulkan rasa permusuhan, pertentangan antara suku, agama dan keturunan. Berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dewasa ini masih tetap merintang perjalanan bangsa Indonesia yang menimbulkan kerawanan yang tidak ringan, kondisi baru, tantangan baru, dan perubahan-perubahan nilai yang terjadi.

5. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 - a. Masalah pembangunan fisik dan sosial masih mewarna isu-isu yang muncul di berbagai desa.
 - b. Penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang meliputi Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Administrasi Penduduk, Administrasi Pembangunan dan Administrasi lainnya belum berjalan dengan baik dimana ada beberapa buku administrasi yang tidak diterapkan dan tidak lengkapnya pengisian beberapa buku administrasi desa.
 - c. Komunikasi Kebijakan dan pendampingan belum dilakukan secara rutin, dalam hal sumber daya, baik dari keterampilan kepala desa dan perangkat desa, anggota BPD, serta lembaga kemasyarakatan desa.
 - d. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur desa, anggota BPD, serta lembaga kemasyarakatan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
 - e. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
 - f. Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan.
 - g. Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan.

6. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - a. Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur.
 - b. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan publik.
 - c. Keterbatasan pelaksana teknis terhadap layanan dan belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas tersebut selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 pada Misi 1 yaitu: Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Adapun tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.” Indikator tujuan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sambas adalah “indeks kepuasan masyarakat di kecamatan” dengan target kinerja pada tahun 2025 yaitu 88,30–90,00 dengan kategori “A”.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Berdasarkan pernyataan tujuan ditetapkanlah sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan

publik di Kecamatan.” Indikator sasaran Kecamatan Jawai adalah indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Jawai dengan target kinerja pada tahun 2025 yaitu 89,25 dengan kategori “A”.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rancangan Rencana Kerja untuk tahun 2025, program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kecamatan Jawai pada dasarnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah:

1. mendukung agar tercapainya visi dan misi kepala daerah Kabupaten Sambas di Kecamatan Jawai;
2. program, kegiatan dan sub kegiatan rutin setiap tahun;
3. program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat
4. program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi, sosial budaya yang menjadi skala prioritas di masing-masing desa se Kecamatan Jawai.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Jawai akan melaksanakan 6 program, 16 kegiatan dan 40 sub kegiatan untuk 1 (satu) tahun kedepan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp 2.600.372.693,00.

Adapun sifat penyebaran program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp2.328.072.693,00 digunakan untuk gaji dan kesejahteraan pegawai, kebutuhan operasional organisasi, akuntabilitas kinerja, pengembangan kompetensi pegawai, dan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana khususnya keperluan pelayanan publik.
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri atas 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp72.700.000,00 digunakan untuk penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat, perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, pengendalian pelayanan, dan pelaksanaan pelayanan yang berhubungan langsung kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terdiri atas 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp131.200.000,00 digunakan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan pembangunan, peningkatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat, dan swasta untuk ikut berperan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat, penanganan stunting dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
4. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum terdiri atas 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp16.900.000,00 digunakan untuk sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

dalam penanganan ketenteraman dan ketertiban umum, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri atas 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp21.800.000,00 digunakan untuk pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, dan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terdiri atas 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp29.700.000,00 digunakan untuk tata kelola administrasi pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, tugas dan fungsi aparatur desa, perencanaan pembangunan desa, pendampingan desa, dan koordinasi pelaksanaan pembangunan di kawasan perdesaan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2025 dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Jawai secara keseluruhan pada tahun 2025 terdiri dari 6 program, 16 kegiatan dan 40 sub kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel di bawah ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN JAWAI KAB. SAMBAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN JAWAI						2.600.372.693,00							2.610.580.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.600.372.693,00							2.610.580.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.600.372.693,00							2.610.580.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.328.072.693,00						-	2.337.380.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	16.000.000,00			-	Program E- Governmen t	-	-	16.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.100.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		4.100.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		4.200.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2.700.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		2.700.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		1.500.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	3.500.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		3.500.000,00	KECAMATAN JAWAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.925.572.693,00			-	Program E-Governmen t	-	-	1.934.880.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.890.692.693,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		1.900.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	29.280.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		29.280.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.400.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		1.400.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	4.200.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		4.200.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	34.000.000,00			-	Program E-Governmen t	-	-	34.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	34.000.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		34.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	122.500.000,00			-	Program E-Governmen t	-	-	122.500.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3.800.000,00	Kab. Sambas, Jawa i, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawa i, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		3.800.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	8.000.000,00	Kab. Sambas, Jawa i, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawa i, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		8.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				47 Paket	15.700.000,00	Kab. Sambas, Jawa i, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawa i, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		15.700.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	13.000.000,00	Kab. Sambas, Jawa i, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawa i, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		13.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sambas, Jawa i, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawa i, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		2.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Sambas, Jawa i, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawa i, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		80.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	Program E-Governmen t	-	-	90.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	45.000.000,00	Kab. Sambas, Jawa i, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawa i, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		45.000.000,00	KECAMATAN JAWAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	6.000.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	30.000.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		30.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	9.000.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		9.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	61.200.000,00			-	Program E-Governmen t	-	-	61.200.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		1.200.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		20.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		40.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	78.800.000,00			-	Program E-Governmen t	-	-	78.800.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	55.000.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		55.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	1.500.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		1.500.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	7.300.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		7.300.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		15.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	72.700.000,00						-	72.700.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	4.000.000,00			-	Program E- Governmen t	-	-	4.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		4.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	16.700.000,00			-	Program E- Governmen t	-	-	16.700.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		3.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3.700.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		3.700.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		10.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	52.000.000,00			-	Program E- Governmen t	-	-	52.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		15.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	37.000.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		37.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	131.200.000,00						-	131.200.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	126.700.000,00			-	Program E- Governmen t	-	-	126.700.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				39 Lembaga Kemasyarak atan	12.000.000,00	Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		12.000.000,00	KECAMATAN JAWAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	4.700.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		4.700.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	110.000.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		110.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	4.500.000,00			-	Program E-Governmen t	-	-	4.500.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		4.500.000,00	KECAMATAN JAWAI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	16.900.000,00						-	16.900.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	7.100.000,00			-	Program E-Governmen t	-	-	7.100.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		3.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	4.100.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		4.100.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	9.800.000,00			-	Program E-Governmen t	-	-	9.800.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	9.800.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Program E-Governmen t	-		9.800.000,00	KECAMATAN JAWAI
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	21.800.000,00						-	21.800.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	21.800.000,00			-	Program E-Governmen t	-	-	21.800.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40 Orang	10.000.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		10.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	6.500.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		6.500.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.05.2.01.0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila														
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				3 Lembaga Masyarakat	2.800.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		2.800.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		2.500.000,00	KECAMATAN JAWAI
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	29.700.000,00						-	30.600.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	29.700.000,00			-	Program E-Governmen t	-	-	30.600.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	2.600.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		2.600.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		10.000.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		2.500.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		12.900.000,00	KECAMATAN JAWAI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.600.000,00	Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawaï, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		2.600.000,00	KECAMATAN JAWAI
	J U M L A H							2.600.372.693,00							2.610.580.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Jawai 2021-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Sambas serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2025.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut di atas, kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya kompetensi personil. Adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui perubahan anggaran sub kegiatan tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan dijadikan evaluasi tahun anggaran berikutnya.

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Pemerintah Kecamatan Jawai menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jawai Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 menjelaskan :

1. Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan Tahun 2025 dengan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, dan lokasi.
2. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah.
3. Seluruh kebijakan pembangunan pada tahun 2025 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif APBD yang diperlukan untuk pendanaannya.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Langkah-langkah persiapan mulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Selanjutnya Camat dan penyelenggara pemerintah Kecamatan Jawai akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025. Dalam kaitan itu maka seluruh lembaga pemerintah maupun swasta serta masyarakat yang menjadi bagian wilayah Kecamatan Jawai perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai pada tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik dengan prinsip *service excellent*, yaitu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Jawai.
- b. Alokasi APBD Kabupaten Sambas untuk Kecamatan Jawai selama ini belum dapat menyentuh semua kebutuhan masyarakat, antara lain disebabkan karena Kecamatan Jawai bukan merupakan pelaksana semua kegiatan fisik langsung ke masyarakat.
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Jawai Tahun 2025 merupakan acuan bagi pegawai di lingkungan pemerintah Kecamatan Jawai sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program

pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seksi-seksi maupun kasubbag-kasubbag di sekretariat serta pegawai/karyawan yang ada di lingkungan Pemerintah Kecamatan Jawai berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Jawai Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Jawai Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing seksi-seksi, maupun kasubbag-kasubbag di sekretariat Pemerintah Kecamatan Jawai perlu menyusun rencana operasionalisasi sub kegiatan kerja tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 - b. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Selain itu masyarakat luas dapat juga berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan/sub kegiatan dalam program-program pembangunan.

4. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap seksi-seksi dan kasubbag-kasubbag di sekretariat Pemerintah Kecamatan Jawai wajib melakukan evaluasi pelaksanaan sub kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran sub kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

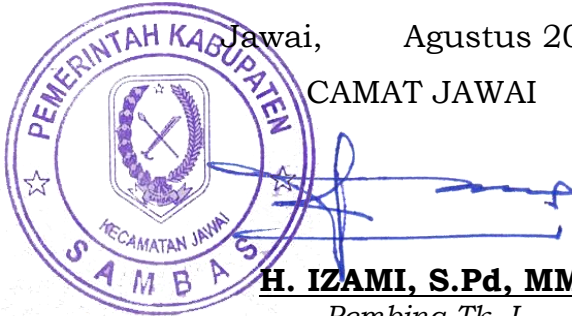
Rencana tindak lanjut dari program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah Kecamatan Jawai adalah

1. tetap mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik (*good government*) dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan berwibawa untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Jawai,
2. perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
3. perlu peningkatan kapasitas SDM kepala seksi dan subbagian agar tertib administrasi sub kegiatan, sehingga memudahkan pengukuran kinerja untuk dijadikan evaluasi oleh pimpinan di atasnya dalam peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun berikutnya.
4. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
5. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
7. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Jawai ini disusun dalam konsep sederhana dengan harapan dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai di Perangkat Daerah Kecamatan Jawai serta partisipasi aktif seluruh stakeholder terkait.

Jawai, Agustus 2024
CAMAT JAWAI



H. IZAMI, S.Pd, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700506 199803 1 003